COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGHADAPI BENCANA TANAH LONGSOR MELALUI PEMBENTUKAN DESA TANGGUH BENCANA DI KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI

Putu Eka Saskara Adi Kusuma
NPP. 33.0728
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik
Email: ekasaskara0203@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd
Email: udayamadjid@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Buleleng Regency, Bali Province, is identified as the area with the highest number of landslide-prone locations in Bali (148 locations), yet the disaster resilience index remains relatively low. Addressing this requires a collaborative approach involving government, indigenous communities (desa adat), and local civil organizations.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the process of collaborative governance in the formation of Disaster Resilient Villages (Destana).* ***Method:*** *This study employed a descriptive qualitative approach with data collection through observation, in-depth interviews with 8 informants, and documentation. Data were analyzed using NVivo 15 software. The study applied the collaborative governance theory of Ansell and Gash (2007) with five dimensions: face-to-face dialogue, trust building, commitment to the process, shared understanding, and intermediate outcomes.* ***Result:*** *The findings indicate that the collaborative governance process in the formation of Destana in Buleleng Regency has run quite well through coordination between BPBD, village governments, and indigenous communities. Improved communication, increased community participation, and disaster training and simulation activities were observed. Supporting factors include the existence of adat rules (awig-awig), local community knowledge, and the Tri Hita Karana concept. Inhibiting factors include differences in perception among stakeholders, limited sustainable communication, community busyness, geographical constraints, and limited resources.* ***Conclusion:*** *Implementation of collaborative governance in Destana formation in Buleleng Regency has progressed through the five collaborative dimensions. It is recommended that the local government strengthen technical regulation, form a district-level Destana coordination forum, and expand training and simulation activities to all landslide-prone villages in Buleleng Regency.*

Keywords: Buleleng Regency; Collaborative Governance; Disaster Resilient Village (Destana); Indigenous Community; Landslide Disaster

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, tercatat sebagai daerah dengan jumlah titik rawan longsor terbanyak di Bali yaitu 148 lokasi, namun indeks ketangguhan bencana daerah masih relatif

rendah. Kondisi ini menuntut pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat adat, dan komunitas lokal. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses collaborative governance dalam pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana). **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam terhadap 8 informan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak NVivo 15. Penelitian menggunakan teori collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2007) dengan lima dimensi yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan collaborative governance dalam pembentukan Destana di Kabupaten Buleleng telah berjalan cukup baik melalui koordinasi antara BPBD, pemerintah desa, dan masyarakat adat. Hal ini terlihat dari meningkatnya komunikasi, partisipasi masyarakat, serta pelaksanaan kegiatan pelatihan dan simulasi kebencanaan. Faktor pendukung meliputi keberadaan aturan adat (awig-awig), pengetahuan lokal masyarakat, dan nilai Tri Hita Karana. Faktor penghambat meliputi perbedaan persepsi antar stakeholder, keterbatasan komunikasi berkelanjutan, kesibukan masyarakat, kondisi geografis, dan keterbatasan sumber daya. **Kesimpulan:** Pelaksanaan collaborative governance dalam pembentukan Destana di Kabupaten Buleleng telah berjalan melalui lima dimensi kolaboratif. Disarankan agar pemerintah daerah memperkuat regulasi teknis, membentuk forum koordinasi Destana tingkat kabupaten, serta memperluas jangkauan pelatihan dan simulasi kebencanaan ke seluruh desa rawan longsor di Kabupaten Buleleng.

Kata kunci: Bencana Tanah Longsor; Collaborative Governance; Desa Tangguh Bencana (Destana); Kabupaten Buleleng; Masyarakat Adat

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia. Letak geografisnya yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik membentuk kondisi alam yang rawan terhadap bencana geologi maupun hidrometeorologi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa sepanjang Januari hingga Agustus 2025 terjadi sekitar 2.056 bencana di seluruh Indonesia, dengan dominasi bencana hidrometeorologi lebih dari 90% dari total kejadian.

Tanah longsor menjadi salah satu bencana yang memberikan dampak signifikan di Indonesia. Berdasarkan data BNPB (2025), frekuensi kejadian tanah longsor pada tahun 2021 mencapai puncaknya dengan lebih dari 1.200 kejadian, dan pada awal tahun 2025 (hingga Agustus) telah tercatat 767 kejadian. Jumlah bangunan rusak akibat tanah longsor pada tahun 2024 melonjak tajam hingga mendekati 7.500 unit.

Provinsi Bali mencatat tanah longsor sebagai bencana dengan proporsi tertinggi, mencapai 26,52% dari total kejadian bencana selama periode 1999–2019. Kabupaten Buleleng menempati posisi tertinggi

dengan 148 lokasi rawan longsor yang tersebar di berbagai bentuk topografi. Kondisi ini menempatkan Buleleng sebagai wilayah yang membutuhkan perhatian serius dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Kerentanan wilayah Buleleng terhadap bencana tanah longsor menuntut adanya pola penanganan yang tidak hanya bertumpu pada intervensi pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat secara aktif melalui pendekatan kolaboratif. Dalam konteks sosial-kultural Bali, struktur masyarakat adat (desa adat) memiliki kapasitas pengorganisasian yang kuat dan sistematis, sehingga menjadi landasan potensial bagi penyelenggaraan mitigasi berbasis komunitas. Salah satu wujud implementasi pendekatan ini adalah melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana). Eksistensi pecalang (petugas pengamanan adat) dan perangkat desa adat di Kabupaten Buleleng memiliki posisi strategis dalam mobilisasi masyarakat saat terjadi keadaan darurat. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul "Collaborative Governance dalam Menghadapi Bencana Tanah Longsor melalui Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali".

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pelaksanaan collaborative governance dalam pembentukan Destana di Kabupaten Buleleng masih menghadapi sejumlah permasalahan. Pertama, terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah yang menggunakan pendekatan administratif dan teknis dengan masyarakat adat yang mengedepankan nilai sosial budaya lokal. Kedua, komunikasi antar pihak belum berjalan secara konsisten dan merata, sehingga informasi kebencanaan tidak selalu tersampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Ketiga, keterbatasan sumber daya—baik anggaran maupun tenaga—menghambat jangkauan program Destana ke seluruh desa rawan longsor. Keempat, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesiapsiagaan bencana masih belum merata, dipengaruhi oleh kesibukan aktivitas sehari-hari dan kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau. Kelima, regulasi lokal dalam pelaksanaan program Destana belum sepenuhnya terstruktur dan memiliki kekuatan hukum yang memadai.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini diilhami oleh beberapa kajian terdahulu yang berkaitan dengan kolaborasi dalam penanggulangan bencana. Asmidin dkk. (2022) menemukan bahwa kolaborasi Triple Helix dalam penanggulangan bencana longsor di Kabupaten Buton belum optimal akibat lemahnya koordinasi dan perbedaan ideologi antar aktor. Aziz Masyhuri dkk. (2021) menyimpulkan bahwa koordinasi multi-stakeholder dalam manajemen bencana tanah longsor di Kota Semarang masih lemah sehingga penanganan belum efektif. Bayu (2020) menemukan bahwa kolaborasi BPBD dengan Sahabat Tagana di Kabupaten Brebes berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana. Dwi Agustina (2017) menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah DIY dan Forum PRB DIY berjalan efektif terutama pada fase pra-bencana. Abdurrahman (2025) menemukan bahwa penerapan collaborative governance dalam penanganan longsor di Kabupaten Purwakarta belum optimal karena koordinasi antar stakeholder masih sektoral.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu dalam beberapa aspek. Pertama, penelitian ini secara khusus mengkaji collaborative governance antara BPBD dan masyarakat adat (desa

adat) Bali dengan menonjolkan dimensi kearifan lokal seperti Tri Hita Karana dan awig-awig dalam pelaksanaan mitigasi bencana. Kedua, penelitian ini menggunakan perangkat lunak NVivo 15 untuk analisis data kualitatif secara sistematis, sehingga menghasilkan visualisasi yang lebih terstruktur. Ketiga, fokus penelitian ini pada konteks Destana sebagai instrumen formal pemerintah yang dipadukan dengan nilai sosial budaya masyarakat adat di wilayah dengan tingkat kerawanan longsor tertinggi di Bali.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses collaborative governance dalam pembentukan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Buleleng.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam proses collaborative governance dalam pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di Kabupaten Buleleng, termasuk interaksi antaraktor, bentuk kolaborasi yang terbangun, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasinya. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan perspektif para aktor yang terlibat.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan lokasi utama pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, serta desa adat yang terlibat dalam program Destana. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi guna memperoleh data yang komprehensif terkait pelaksanaan collaborative governance dalam mitigasi bencana longsor.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program Destana. Jumlah informan sebanyak delapan orang yang terdiri atas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buleleng, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD, Kepala Desa, Kepala Desa Adat, Tokoh Masyarakat Adat, dan anggota masyarakat.

Dalam penelitian ini, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buleleng ditetapkan sebagai informan kunci karena BPBD merupakan instansi utama yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam perencanaan, koordinasi, serta pelaksanaan program Destana di Kabupaten Buleleng. Informan ini dipandang memiliki informasi yang paling komprehensif mengenai proses kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mitigasi bencana. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dipilih karena memiliki peran dalam pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan upaya pengurangan risiko bencana. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan serta Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dipilih karena terlibat langsung dalam pelaksanaan program, penyusunan strategi mitigasi, dan penanganan kebencanaan di lapangan. Kepala Desa dan Kepala Desa Adat dipilih karena berperan sebagai aktor lokal yang menjembatani kebijakan pemerintah dengan masyarakat. Adapun Tokoh Masyarakat Adat dan anggota masyarakat dipilih untuk memperoleh perspektif mengenai partisipasi masyarakat, penerapan kearifan lokal,

serta pengalaman langsung dalam pelaksanaan program Destana. Dengan demikian, pemilihan informan dilakukan untuk memperoleh data yang beragam dan mampu merepresentasikan seluruh aktor yang terlibat dalam collaborative governance pembentukan Destana di Kabupaten Buleleng.

Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak NVivo 15 melalui proses open coding yang menghasilkan parent nodes dan child nodes berdasarkan dimensi teori collaborative governance. Penelitian menggunakan teori Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash (2007) yang terdiri dari lima dimensi: (1) dialog tatap muka; (2) membangun kepercayaan; (3) komitmen terhadap proses; (4) pemahaman bersama; dan (5) hasil sementara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis proses collaborative governance dalam penelitian ini menggunakan NVivo 15 dengan membangun hirarki nodes yang merepresentasikan lima dimensi teori collaborative governance. Hasil analisis word cloud menunjukkan dominasi kemunculan kata desa, masyarakat, komunikasi, kolaborasi, adat, longsor, dan destana, yang mengindikasikan bahwa desa menjadi ruang utama pelaksanaan proses kolaborasi.

3.1. Dialog Tatap Muka

Dialog tatap muka dilaksanakan melalui rapat koordinasi lintas sektor, musyawarah desa, pertemuan di tingkat banjar, serta kunjungan lapangan yang dilakukan BPBD bersama pemerintah desa dan masyarakat adat. Kepala Pelaksana BPBD, I Gede Suyasa, S.P., menyampaikan bahwa pihaknya rutin datang langsung ke desa untuk berdiskusi dengan perangkat desa, bendesa adat, serta tokoh masyarakat guna mengidentifikasi kebutuhan dan kondisi lapangan. Kegiatan sosialisasi dan simulasi kebencanaan dilaksanakan langsung di tingkat desa sebagai ruang dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Forum paruman desa adat menjadi sarana komunikasi yang efektif dalam membangun dialog kolaboratif berbasis nilai sosial masyarakat setempat.

Pelaksanaan dialog tatap muka tersebut menunjukkan bahwa proses pembentukan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Buleleng dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip partisipasi dan keterbukaan antaraktor. Dialog tidak hanya dimaknai sebagai sarana penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga menjadi ruang bersama untuk membangun kesepahaman terkait kondisi kerawanan bencana, kebutuhan masyarakat, serta langkah-langkah mitigasi yang perlu dilakukan secara kolektif. Melalui interaksi yang berlangsung secara langsung, setiap pihak memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, maupun aspirasi sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing.

Kegiatan rapat koordinasi lintas sektor menjadi wadah bagi BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah desa, perangkat kecamatan, serta unsur masyarakat adat untuk membahas berbagai isu strategis terkait penanggulangan bencana tanah longsor. Dalam forum tersebut, para pemangku kepentingan melakukan identifikasi terhadap wilayah rawan bencana, menyusun rencana mitigasi, serta membahas mekanisme pembagian tugas dan tanggung jawab. Pola komunikasi yang dibangun secara rutin mampu meningkatkan efektivitas koordinasi dan meminimalkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antarinstansi.

Selain dilaksanakan melalui forum formal, dialog tatap muka juga dilakukan melalui kunjungan lapangan ke desa-desa yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana tanah longsor. Kegiatan ini memungkinkan pemerintah memperoleh informasi faktual mengenai kondisi geografis, karakteristik sosial

masyarakat, serta potensi risiko yang dihadapi di setiap wilayah. Pada saat yang sama, masyarakat juga memperoleh kesempatan untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi secara langsung kepada pemerintah, sehingga solusi yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan.

Forum paruman desa adat dan pertemuan banjar menjadi instrumen penting dalam memperkuat dialog kolaboratif karena telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Bali. Pemanfaatan forum adat menunjukkan adanya pengakuan terhadap peran strategis masyarakat adat dalam mendukung penanggulangan bencana. Melalui forum tersebut, informasi mengenai mitigasi bencana dapat disampaikan dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan nilai-nilai lokal yang berlaku di masyarakat.

Keterlibatan bendesa adat, kelian banjar, pecalang, dan tokoh masyarakat dalam forum dialog turut meningkatkan efektivitas komunikasi antaraktor. Tokoh adat tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga berperan dalam menjembatani perbedaan pandangan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan kebencanaan. Keberadaan tokoh lokal yang memiliki legitimasi sosial yang kuat menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana dialog yang inklusif dan kondusif.

Kegiatan sosialisasi dan simulasi kebencanaan yang dilakukan secara berkala semakin memperkuat kualitas dialog yang terbangun. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat tidak hanya menerima materi terkait mitigasi bencana, tetapi juga terlibat aktif dalam diskusi dan praktik lapangan. Proses pembelajaran bersama ini memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan antara pemerintah dengan masyarakat, termasuk pemanfaatan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat dalam mengenali tanda-tanda awal terjadinya tanah longsor.

Dialog tatap muka yang dilaksanakan secara berulang dan berkelanjutan menjadi sarana penting dalam membangun hubungan kerja sama yang lebih erat antaraktor. Intensitas komunikasi yang tinggi mampu mengurangi kesenjangan informasi, memperkuat koordinasi, serta menciptakan rasa saling memiliki terhadap program Destana. Dengan demikian, dialog tatap muka tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membangun collaborative governance yang efektif dan berkelanjutan dalam menghadapi ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Buleleng.

3.2. Membangun Kepercayaan

Kepercayaan dibangun melalui komunikasi intensif, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kebencanaan, serta peran tokoh lokal sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, I Gusti Bagus Rony Ariyana, SH, menyampaikan bahwa BPBD secara rutin melakukan kunjungan ke desa baik dalam bentuk sosialisasi maupun koordinasi, menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat, dan melibatkan tokoh adat sebagai perantara komunikasi. Keterlibatan berulang masyarakat desa dalam kegiatan mitigasi menjadi faktor penting dalam memperkuat hubungan kepercayaan antar stakeholder.

Dalam kerangka collaborative governance, kepercayaan merupakan modal sosial yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Kepercayaan tidak terbentuk secara instan, tetapi dibangun melalui interaksi yang berulang, komunikasi yang terbuka, serta pengalaman bekerja sama dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Buleleng berupaya membangun hubungan yang dekat dengan masyarakat melalui pendekatan persuasif dan partisipatif.

Pelaksanaan kunjungan rutin ke desa-desa rawan bencana menjadi salah satu strategi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kehadiran pemerintah secara langsung di tengah masyarakat menunjukkan adanya komitmen dan kepedulian terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Melalui kunjungan tersebut, masyarakat dapat melihat bahwa pemerintah tidak hanya hadir ketika bencana terjadi, tetapi juga berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana.

Penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami menjadi faktor penting dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Penyampaian informasi yang terlalu teknis berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan menghambat proses transfer pengetahuan kepada masyarakat. Oleh karena itu, BPBD berupaya menyesuaikan metode komunikasi dengan karakteristik sosial dan tingkat pemahaman masyarakat agar pesan terkait mitigasi bencana dapat diterima dengan baik.

Selain itu, keterlibatan tokoh adat seperti bendesa adat, kelian banjar, dan pecalang turut memperkuat hubungan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Tokoh adat memiliki posisi strategis karena dianggap memahami kondisi sosial masyarakat serta memiliki pengaruh yang kuat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal. Kehadiran tokoh adat sebagai perantara komunikasi mampu meningkatkan legitimasi program pemerintah dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif.

Kepercayaan juga dibangun melalui pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi. Keterlibatan tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berkontribusi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Ketika masyarakat merasa didengar dan dilibatkan, maka rasa memiliki terhadap program yang dijalankan akan semakin meningkat.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, simulasi kebencanaan, pemetaan wilayah rawan longsor, serta kegiatan pelestarian lingkungan menjadi pengalaman kolektif yang memperkuat hubungan antaraktor. Pengalaman bekerja bersama secara berulang mampu menciptakan ikatan emosional, memperkuat solidaritas sosial, dan menumbuhkan keyakinan bahwa seluruh pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan masyarakat.

Di sisi lain, transparansi dalam penyampaian informasi dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan turut menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan. Pemerintah secara konsisten memberikan informasi mengenai program, tujuan, dan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat. Keterbukaan tersebut membantu mengurangi keraguan masyarakat dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis antaraktor.

Dengan demikian, kepercayaan yang terbangun melalui komunikasi intensif, keterlibatan masyarakat, pemanfaatan tokoh adat, serta transparansi dalam pelaksanaan program menjadi modal sosial utama dalam mendukung keberhasilan collaborative governance. Kepercayaan yang kuat tidak hanya memperlancar koordinasi dan kerja sama antaraktor, tetapi juga menjadi landasan penting bagi keberlanjutan program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Buleleng.

3.3. Komitmen Terhadap Proses

Komitmen terhadap proses kolaborasi tercermin melalui keterlibatan aktif BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah desa, dan masyarakat adat dalam kegiatan mitigasi secara berkelanjutan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, I Gede Putra Aryana, S.Sos., M.A.P., menyampaikan bahwa keterlibatan antar pihak sangat penting karena masyarakat adat memiliki aturan tersendiri terkait pengelolaan hutan atau lahan yang

mendukung upaya mitigasi. Nilai sosial ngayah (gotong royong tanpa pamrih) dalam budaya adat Bali menjadi faktor penguat komitmen masyarakat terhadap pelaksanaan program Destana.

Komitmen para aktor dalam proses kolaborasi terlihat dari keberlanjutan berbagai program mitigasi yang dilaksanakan secara konsisten. Kegiatan sosialisasi, pelatihan, simulasi kebencanaan, pemetaan wilayah rawan longsor, hingga upaya pelestarian lingkungan dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk keseriusan seluruh pihak dalam mengurangi risiko bencana.

Keterlibatan berbagai organisasi perangkat daerah menunjukkan bahwa penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. BPBD berperan sebagai koordinator utama, sementara Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah desa, dan masyarakat adat menjalankan fungsi sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing. Pembagian peran tersebut mencerminkan adanya komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Masyarakat adat juga menunjukkan komitmen yang kuat melalui penerapan aturan adat yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Berbagai ketentuan mengenai pengelolaan hutan, larangan penebangan liar, serta pemanfaatan lahan secara bijaksana menjadi bentuk kontribusi nyata masyarakat adat dalam mendukung upaya mitigasi bencana tanah longsor.

Keberadaan nilai sosial ngayah menjadi salah satu faktor utama yang memperkuat komitmen masyarakat. Nilai gotong royong yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Bali mendorong partisipasi sukarela dalam berbagai kegiatan kebencanaan tanpa mengharapkan imbalan material. Semangat kolektif tersebut menciptakan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga keselamatan lingkungan dan masyarakat. Komitmen terhadap proses kolaborasi juga ditunjukkan melalui konsistensi komunikasi dan koordinasi antaraktor. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, seluruh pihak tetap berupaya menjaga keberlangsungan program melalui pertemuan rutin dan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan.

Dengan demikian, komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan proses collaborative governance. Komitmen tersebut tidak hanya tercermin dalam partisipasi formal, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan nyata yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana dan peningkatan ketangguhan masyarakat di Kabupaten Buleleng.

3.4. Pemahaman Bersama

Pemahaman bersama dibangun melalui kegiatan sosialisasi, simulasi kebencanaan, dan komunikasi berulang antara semua pihak. Kegiatan simulasi kebencanaan berperan penting dalam membangun kesamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat mengenai langkah mitigasi yang harus dilakukan. Forum paruman desa adat dan pertemuan banjar menjadi media komunikasi yang efektif karena dilakukan sesuai dengan nilai sosial masyarakat setempat, sehingga informasi lebih mudah dipahami secara kontekstual.

Pemahaman bersama merupakan elemen penting dalam proses collaborative governance karena menentukan arah dan tujuan kolaborasi yang akan dicapai. Kesamaan persepsi mengenai permasalahan, tujuan, serta langkah-langkah mitigasi menjadi dasar bagi terciptanya sinergi antarpemangku kepentingan dalam pembentukan Desa Tangguh Bencana. Upaya membangun pemahaman bersama dilakukan melalui berbagai kegiatan edukasi kebencanaan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan tokoh adat. Sosialisasi yang dilaksanakan secara berkala bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai penyebab, dampak, dan langkah mitigasi terhadap ancaman tanah longsor.

Pelaksanaan simulasi kebencanaan memberikan pengalaman langsung kepada masyarakat mengenai prosedur evakuasi, mekanisme koordinasi, serta tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Kegiatan ini membantu menyamakan pemahaman seluruh pihak mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing dalam situasi darurat.

Forum paruman desa adat dan pertemuan banjar menjadi media yang efektif untuk membangun kesepahaman karena memanfaatkan pola komunikasi yang telah dikenal masyarakat. Informasi yang disampaikan melalui forum adat cenderung lebih mudah diterima karena menggunakan pendekatan budaya yang sesuai dengan nilai dan norma setempat. Komunikasi yang dilakukan secara berulang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran bersama antarpemangku kepentingan. Melalui interaksi yang intensif, masyarakat tidak hanya menerima informasi dari pemerintah, tetapi juga berkontribusi melalui pengetahuan lokal dan pengalaman yang dimiliki dalam menghadapi bencana.

Dengan demikian, pemahaman bersama yang terbangun melalui komunikasi berkelanjutan dan pemanfaatan kearifan lokal menjadi faktor penting dalam memperkuat efektivitas kolaborasi. Kesamaan persepsi tersebut memungkinkan seluruh aktor bergerak dalam arah yang sama untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat terhadap ancaman tanah longsor.

3.5. Hasil Sementara

Hasil sementara dari proses kolaborasi terlihat melalui meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebencanaan, berkembangnya komunikasi lintas stakeholder di tingkat desa, dan tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi berbasis komunitas. Kegiatan pelatihan mendorong masyarakat memahami langkah-langkah respons awal secara lebih terarah. Masyarakat juga semakin memahami kondisi lingkungan desa berkaitan dengan potensi tanah longsor melalui kegiatan pemetaan wilayah.

Peningkatan partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan awal dari pelaksanaan collaborative governance dalam pembentukan Desa Tangguh Bencana. Masyarakat mulai terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan seperti sosialisasi, simulasi kebencanaan, kerja bakti lingkungan, dan pemetaan wilayah rawan longsor. Komunikasi lintas stakeholder juga mengalami perkembangan yang signifikan. Hubungan koordinatif antara BPBD, pemerintah desa, Dinas Lingkungan Hidup, masyarakat adat, dan unsur masyarakat lainnya menjadi lebih intensif melalui berbagai forum komunikasi yang diselenggarakan secara rutin.

Pelaksanaan pelatihan dan simulasi kebencanaan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Masyarakat mulai memahami prosedur evakuasi, mekanisme pelaporan, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan pada saat terjadi bencana tanah longsor.

Kegiatan pemetaan partisipatif turut membantu masyarakat mengenali kondisi lingkungan di wilayahnya masing-masing. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat mengidentifikasi titik-titik rawan longsor, jalur evakuasi, serta lokasi yang dapat digunakan sebagai tempat pengungsian sementara. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi berbasis komunitas menunjukkan bahwa program Destana telah memberikan dampak positif terhadap perubahan pola pikir masyarakat. Masyarakat tidak lagi memandang penanggulangan bencana sebagai tanggung jawab pemerintah semata, tetapi sebagai tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan seluruh pihak.

Dengan demikian, berbagai hasil sementara yang telah dicapai menunjukkan bahwa proses collaborative governance dalam pembentukan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Buleleng telah berjalan ke arah yang positif. Meskipun masih memerlukan penguatan pada berbagai aspek, kolaborasi yang terbangun telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat menghadapi ancaman bencana tanah longsor.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan collaborative governance dalam pembentukan Destana di Kabupaten Buleleng telah berjalan cukup baik melalui lima dimensi yang dikemukakan Ansell dan Gash (2007). Hal ini sejalan dengan temuan Abdurrahman (2025) yang menemukan peningkatan komunikasi dan partisipasi masyarakat sebagai capaian positif collaborative governance, namun koordinasi antar stakeholder masih perlu dioptimalkan.

Keunikan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya terletak pada peran masyarakat adat Bali sebagai aktor kolaborasi yang tidak hanya menjadi penerima program, tetapi juga sebagai penjaga nilai budaya yang memperkuat mitigasi bencana. Konsep Tri Hita Karana dan awig-awig menjadi faktor pendukung yang tidak ditemukan dalam penelitian Asmidin dkk. (2022) maupun Bayu (2020). Temuan ini memperluas perspektif collaborative governance dengan menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat menjadi pilar penting dalam membangun ketangguhan komunitas terhadap bencana.

Faktor penghambat berupa perbedaan persepsi antara pendekatan administratif pemerintah dan pendekatan nilai budaya masyarakat adat selaras dengan temuan Aziz Masyhuri dkk. (2021) terkait lemahnya koordinasi antar pihak. Hal ini mengindikasikan bahwa harmonisasi antara sistem kebijakan formal dengan tatanan nilai adat menjadi kunci keberhasilan collaborative governance dalam konteks penanggulangan bencana berbasis komunitas.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini menemukan bahwa NVivo 15 sebagai alat analisis data kualitatif memberikan kontribusi metodologis yang signifikan. Visualisasi word cloud, project map, hierarchy chart, dan word tree membantu mengidentifikasi pola dan hubungan antar tema secara lebih sistematis. Penggunaan NVivo dalam penelitian collaborative governance kebencanaan di Indonesia masih relatif terbatas, sehingga pendekatan ini memberikan nilai kebaruan metodologis dalam kajian pemerintahan dan kebencanaan.

Selain menghasilkan temuan utama mengenai pola collaborative governance, penelitian ini juga berhasil mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hasil analisis menggunakan NVivo 15, faktor pendukung didominasi oleh kekuatan modal sosial dan kearifan lokal masyarakat. Keberadaan awig-awig sebagai aturan adat, pengetahuan lokal masyarakat dalam mengenali potensi longsor, serta penerapan nilai Tri Hita Karana menjadi fondasi penting dalam membangun kesadaran kolektif terhadap mitigasi bencana. Di samping itu, dukungan pemerintah daerah melalui kegiatan sosialisasi, simulasi kebencanaan, serta koordinasi lintas sektor antara BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup turut memperkuat efektivitas kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan sejumlah hambatan yang memengaruhi implementasi collaborative governance dalam pembentukan Destana. Hambatan tersebut meliputi perbedaan persepsi antar stakeholder, rendahnya tingkat kesadaran sebagian masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana, serta

keterbatasan partisipasi masyarakat akibat aktivitas pekerjaan sehari-hari. Faktor geografis berupa aksesibilitas wilayah yang terbatas juga menjadi tantangan dalam proses koordinasi dan distribusi sumber daya. Selain itu, belum kuatnya regulasi lokal yang mengatur pelaksanaan program secara formal serta keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menyebabkan implementasi program belum dapat menjangkau seluruh desa rawan longsor secara optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan collaborative governance dalam mitigasi bencana tidak hanya ditentukan oleh kualitas hubungan antar aktor, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, dukungan sumber daya, serta kemampuan mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam kebijakan kebencanaan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan: Pertama, proses collaborative governance dalam pembentukan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Buleleng telah berjalan melalui lima dimensi yaitu dialog tatap muka melalui rapat koordinasi, musyawarah, dan simulasi kebencanaan; membangun kepercayaan melalui komunikasi intensif dan keterlibatan tokoh adat; komitmen terhadap proses melalui keterlibatan aktif stakeholder secara berkelanjutan; pemahaman bersama melalui kesamaan tujuan meningkatkan kesiapsiagaan; serta hasil sementara berupa meningkatnya partisipasi dan koordinasi antar stakeholder.

Kedua, faktor penghambat collaborative governance meliputi perbedaan persepsi antar stakeholder, kurangnya kesadaran masyarakat, kesibukan masyarakat desa, keterbatasan aksesibilitas geografis, regulasi lokal yang belum terstruktur, dan keterbatasan sumber daya. Faktor pendukung meliputi keberadaan awig-awig, pengetahuan lokal masyarakat, dan nilai Tri Hita Karana.

Ketiga, upaya penerapan collaborative governance dilaksanakan melalui kegiatan peduli lingkungan (palemahan), peningkatan kapasitas masyarakat, pelatihan dan simulasi kebencanaan, pembentukan kesadaran masyarakat, serta monitoring dan evaluasi. Guna meningkatkan efektivitas collaborative governance, disarankan agar pemerintah daerah memperkuat regulasi teknis, membentuk forum koordinasi Destana tingkat kabupaten, mengintegrasikan program Destana dalam dokumen RPJMD dan RKPD, serta meningkatkan pendampingan teknis kepada desa rawan longsor secara berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada cakupan wilayah yang berfokus pada Kabupaten Buleleng dan hanya mengandalkan 8 informan dari instansi pemerintah dan komunitas lokal yang terlibat langsung dalam program Destana. Arah Masa Depan Penelitian (future work). Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods, serta memperluas cakupan penelitian ke kabupaten/kota lain di Bali untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan collaborative governance dalam program Destana.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd selaku Dosen Pembimbing, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, seluruh informan dan masyarakat adat Kabupaten Buleleng yang telah memberikan dukungan, data, serta informasi kepada peneliti selama pelaksanaan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, M. A. (2025). Analisis collaborative governance dalam penanganan bencana alam tanah longsor di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta. *Imperium: Jurnal Kajian Pemerintahan dan Kebijakan Publik, 1*(2), 85–96. https://jurnal-pasca.unla.ac.id/imperium/article/view/165

Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.

Asmiddin, A., Sadat, A., & Basir, M. A. (2022). Kolaborasi triple helix dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Buton. *Jurnal Manajemen Bencana (JMB), 8*(1), 71–82. https://doi.org/10.33172/jmb.v8i1.960

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications. Cruden, D. M. (1991). A simple definition of a landslide. Bulletin of the International Association for Engineering Geology, 43(1), 27–29.

Dasanayaka, U. A., & Matsuda, Y. (2019). A study on local knowledge in adaptation to landslide disasters in Sri Lanka. *Engineering Journal, 23*(6), 501–509. https://doi.org/10.4186/ej.2019.23.6.501

Highland, L. M., & Bobrowsky, P. (2008). The landslide handbook: A guide to understanding landslides (USGS Circular 1325). U.S. Geological Survey.

Islam, M. S., Chu, C., & Smart, J. C. R. (2021). Disaster risk governance for district-level landslide risk management in Bangladesh. International Journal of Disaster Risk Reduction, 59, 102220. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102220

Izzah, U., & Bakri, R. (2024). *Collaborative governance dalam upaya penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Gowa* (Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri). Repository Institut Pemerintahan Dalam Negeri. https://eprints.ipdn.ac.id/18575/

Masyhuri, A., Purnaweni, H., Herawati, A. R., & Priyadi, B. P. (2021). Kolaborasi antar stakeholder dalam manajemen bencana tanah longsor di Kota Semarang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4*(2), 854–862. https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.759

Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya. Moningka, Y. L. (2024). Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana tanah longsor di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara.

At Thariq, M. B., & Madjid, U. (2024). *Network governance dalam penanggulangan bencana tanah longsor pada masa tanggap darurat di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan* (Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri). Repository Institut Pemerintahan Dalam Negeri. https://eprints.ipdn.ac.id/18589/

Neuman, W. L. (2014). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches (7th ed.). Pearson.

Octavianti, T., Mercer, J., Yulianti, E. L., & Sari, A. D. (2024). Leveraging local knowledge for landslide disaster risk reduction in an urban informal settlement in Manado, Indonesia. International Journal of Disaster Risk Reduction, 111, 104710. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2024.104710

Parwati, N. P., Yudhistira, I. K., & Satya, M. G. (2022). Peran desa adat dalam mitigasi bencana berbasis komunitas di Bali. Jurnal Kajian Kebijakan Publik, 6(2), 134–145.

Putra, B. P. (2024). *Kolaborasi Sahabat Tagana dan BPBD dalam menanggulangi bencana longsor di Desa Sridadi Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes* (Skripsi Sarjana Terapan, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung). Repository Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. https://repository.poltekesos.ac.id/handle/123456789/516

Salisa, M. E. R. (2023). *Evaluasi mitigasi bencana tanah longsor melalui Landslide Early Warning System (LEWS) di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah* (Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri). Repository Institut Pemerintahan Dalam Negeri. https://eprints.ipdn.ac.id/13723/

Sholikah, S. N. H., Prambudi, S. K. N., Effendi, M. Y., Safira, L., Alwinda, N., & Setiaji, R. (2021). Analisis kesiapsiagaan dan mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Ponorogo. JPIG (Jurnal Pendidikan dan Ilmu Geografi), 6(1), 81–91. https://doi.org/10.21067/jpig.v6i1.5278

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi revisi). Alfabeta.

Suminto, M. R., & Sutiyo. (2023). *Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur* (Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri). Repository Institut Pemerintahan Dalam Negeri. http://eprints.ipdn.ac.id/12686/

Suryajaya, E., & Suhendra, A. (2019). Analisis mitigasi bencana tanah longsor dan metode pengendaliannya (Studi kasus proyek jalan di Jambi). JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil, 2(4), 177–186. https://doi.org/10.24912/jmts.v2i4.6189

Wang, F., Wang, Y., & Li, T. (2023). The indispensable role of resilience in rational landslide risk management for social sustainability. Geography and Sustainability, 4(1), 70–83. https://doi.org/10.1016/j.geosus.2022.11.007